

Media Online	Banyumasekspres.id
Tanggal	28 Juli 2025
Wilayah	Kabupaten Cilacap



Dana Desa Tahap Pertama Cair Rp 172 M, Bupati Cilacap Minta Pengawasan Diperketat

<https://banyumasekspres.id/dana-desa-tahap-pertama-cair-rp-172-m-bupati-cilacap-minta-pengawasan-diperketat>

BANYUMASEKSPRES.ID, CILACAP – Pemerintah Kabupaten Cilacap telah mencairkan dana desa tahap pertama, dengan jumlah yang mencapai Rp 172 miliar. Dana ini mulai disalurkan ke ratusan desa sejak bulan April lalu.

Menyikapi besarnya alokasi anggaran tersebut, Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman, menekankan pentingnya pengelolaan dana desa yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efektif.

Menurutnya, hal ini sangat krusial untuk mencegah terjadinya potensi penyimpangan dan persoalan hukum di masa mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Syamsul menjelaskan bahwa transparansi serta akuntabilitas merupakan elemen penting dalam pengelolaan Dana Desa guna mewujudkan pembangunan yang benar-benar berpihak pada masyarakat.

“Transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan Dana Desa adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan yang benar-benar berpihak pada masyarakat,” ujar Bupati saat ditemui oleh awak media pada hari Sabtu (26/7).

Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa pengawasan tidak hanya harus dilakukan setelah dana dicairkan tetapi juga sebaiknya dimulai sejak proses administrasi dan pengajuan pencairan anggaran tersebut.

Saat ini, terdapat 136 desa di Kabupaten Cilacap yang masih dalam proses pengajuan pencairan Dana Desa Tahap 2 dengan total nilai lebih dari Rp 76 miliar.

Untuk itu, Bupati berkomitmen untuk mengoptimalkan pengawasan agar dana tersebut digunakan sesuai peruntukannya.

Sebagian besar dari dana desa yang disalurkan dialokasikan untuk berbagai program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, ketahanan pangan, penanganan stunting, penguatan pelayanan berbasis digital serta program padat karya tunai.

Meskipun demikian, Bupati Syamsul memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan 20 persen dari Dana Desa yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan dan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran atau penyertaan modal terhadap BUMDes harus memberikan dampak yang signifikan bagi ekonomi desa,” tegas Syamsul Aulia Rachman.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memastikan bahwa setiap sen dari dana desa digunakan dengan tepat sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa juga menjadi hal yang ditekankan oleh Bupati Cilacap.

Menurutnya, pengawasan tidak seharusnya hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat atau aparat penegak hukum saja tetapi masyarakat juga memiliki peran penting dalam hal ini.

“Intinya keterbukaan jadi masyarakat bisa turut mengawasi termasuk para perangkat desa. Selain itu laporan berkala atau audit internal juga harus dilakukan,” tandasnya.

Pengawasan ketat perlu dilakukan mengingat alokasi Dana Desa terus meningkat setiap tahunnya. Dengan adanya peningkatan ini maka seluruh perangkat desa diingatkan agar tidak lengah serta selalu patuh terhadap regulasi dan menjaga kepercayaan publik.

Penegasan ini menunjukkan komitmen Bupati untuk memastikan bahwa seluruh perangkat desa tetap menjalankan tugas mereka dengan integritas tinggi.

“Dana Desa harus memberi dampak nyata bagi kesejahteraan warga. Untuk itu, pengelolaan yang cermat dan pengawasan yang kuat adalah mutlak,” pungkas Bupati Syamsul Aulia Rachman sembari menambahkan bahwa evaluasi secara berkala atas penggunaan dana tersebut akan terus dilakukan demi meningkatkan kualitas hidup warga desa di Kabupaten Cilacap.

Dengan langkah-langkah konkret dan komitmen tegas dari pemerintah daerah seperti ini diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat melalui pemanfaatan optimal dari Dana Desa sehingga pembangunan berkelanjutan dapat tercapai sesuai dengan harapan semua pihak. (jul/stch)